

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan interaksi yang terjadi melintasi batas negara yang dilakukan oleh actor-aktor tertentu sesuai dengan kepentingannya, dan beberapa kebijakan yang berlaku untuk mengatur hubungan tersebut. Awalnya, pembahasan dan aktor dalam menjalin hubungan menjalin suatu hubungan dengan negara lain seringkali High Politic dan tertutup. Hubungan Internasional adalah studi mengenai pola akis dan reaksi di antara negara-negara berdaulat yang diwakili oleh elit pemerintah (Coulombis dan Wolfe, 2004: 24).

Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani mengatakan bahwa:

“Kajian hubungan internasional adalah studi tentang interaksi antar aktor yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan keharusan sebagai akibat saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya negara yang menutup diri dari dunia luar“ (Perwita & Yani, 2005, 3-4).

Menurut McClellan dalam buku *The Dictionary of World Politics*, mendefinisikan

Hubungan Internasional sebagai studi tentang interaksi antara jenis kesatuan sosial tertentu, di mana di dalamnya terdapat studi tentang keadaan yang relevan yang mengelilingi interaksi tersebut. Baik yang dilakukan oleh negara ataupun non-negara. Hubungan internasional mencakup pengkajian politik luar negeri dan politik internasional dan meliputi segala segi hubungan di antara berbagai negara di dunia (Perwita dan Yani, 2005:4).

Mas' oed (2002: 29) di dalam bukunya menyatakan bahwa:

“Tujuan utama studi Hubungan Internasional adalah untuk mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor negara ataupun aktor non-negara dalam area internasional. Perilaku itu dapat berwujud konflik, kerjasama, dan sebagainya“.

Hubungan internasional berawal dari kontak dan interaksi di antara negara-negara di dunia, terutama masalah politik. Seiring dengan perkembangan zaman, isu-isu internasional juga mengalami perubahan. aktor negara dan non-negara mulai menunjukkan ketertarikan kepada isu-isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan kebudayaan (Hadiwinata, 2007: 5).

Hubungan Internasional Arti hubungan internasional secara umum adalah kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Hubungan Internasional merupakan hubungan antar bangsa, kelompokkelompok bangsa dan masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, proses-

proses yang menentukan cara hidup, cara berfikir dan bertindak. Dalam Hubungan internasional pun ada banyak interaksi negara dan masyarakat internasional (Darmayadi 2015:22).

2.1.2 Kerja Sama Internasional

Suatu negara tidak dapat berfungsi tanpa hubungan dengan negara lain. Saya sangat membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Bentuk kerjasama tersebut dapat berupa kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan dan keamanan. Setiap negara memiliki tujuan yang berbeda-beda, salah satunya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fakta ini menunjukkan perlunya kerjasama dengan negara lain. (Tambunan, 2000:45).

Dalam politik internasional, setiap negara memperjuangkan kepentingan nasional negaranya dalam memenuhi kebutuhan. Ditinjau dari sisi hubungan internasional, Indonesia berkepentingan untuk menjelaskan dan memahami kekayaan potensinya kepada negara dan bangsa lain demi kemajuan hubungan kerjasama dan pembangunan internasional. (Shoelhi, 2011:17).

Perwita dan Yani, dalam bukunya ilmu hubungan internasional mendefinisikan

Kerjasama dalam hubungan internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional. Kerjasama Internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional, yang meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi didalam negerinya sendiri.

Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauhmana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif (Perwita & Yani, 2005: 33-34).

Bentuk-bentuk dalam kerjasama internasional berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan hubungan kerjasama antara lain dibedakan menjadi kerjasama bilateral, multilateral, trilateral dan regional. Sebagai salah satu bentuk kerjasama, kerjasama bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan antara dua buah pihak. Pola-pola yang terbentuk dari proses interaksi dilihat dari kecenderungan

sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan bilateral. (Perwita & Yani, 2005:33).

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 34).

Kerjasama internasional mengandung satu interaksi, interelasi dan interdependensi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok dari satu kesatuan unit dalam system internasional dan masyarakat internasional :

“Kerjasama internasional dapat dijalankan dalam berbagai bentuk organisasi internasional, walaupun negara tetap menjadi aktor yang dominan di dalam bentuk-bentuk kerjasama internasional non-pemerintah yang makin hari makin banyak jumlahnya”. (Rudy, 2005: 3).

Mengenai masalah kerjasama internasional merupakan bukti dari adanya saling pengertian antar bangsa (international understanding) sebagai akibat dari adanya interdependensi antar bangsa dan bertambah kompleksnya kehidupan dalam

masyarakat internasional (Perwita & Yani, 2005: 121).

Adapun beberapa faktor yang menjadi fokus perhatian di dalam suatu kerjasama internasional adalah sebagai berikut :

1. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.

2. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006:6).

2.1.3 Diplomasi

Diplomasi secara etimologis, berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “Diploun”. Kata “Diploma” lebih dekat artinya dengan duplikasi yang berarti menggandakan atau melipat dua. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Umum Bahasa Indonesia, diplomasi berarti urusan dalam penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara lain, atau urusan kepentingan sebuah negara

dengan perantaraan wakilnya membina hubungan antar satu negara dengan negara lain. (Shoelhi, 2011: 74).

Diplomasi dalam dunia politik mengacu pada proses komunikasi antara aktor-aktor internasional melalui negosiasi untuk menyelesaikan konflik. Diplomasi merupakan praktik dalam komunikasi antarnegara dan implementasi dari kebijakan luar negeri dari suatu negara. Dalam diplomasi, penerapan taktik dan kecerdasan merupakan hal penting dalam menunjang keberhasilan diplomasi. Keduanya dirangkai menjadi konsep strategi diplomasi (Shoelhi, 2011: 76).

Dalam artian klasik, diplomasi berfungsi Adapun fungsi diplomasi adalah sebagai berikut. (Shoelhi, 2011: 85-86):

a. Reporting

Fungsi pelaporan (reporting) adalah melaporkan perkembangan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya yang terjadi di negara akreditasi dan mengomunikasikan informasi penting lain yang perlu diketahui negara akreditasi.

Dalam konteks ini, seorang diplomat dituntut untuk bekerja sungguh-sungguh dalam memantau perkembangan yang terjadi, khususnya untuk menangkap peluang-peluang menguntungkan yang bisa dimanfaatkan.

b. Representation

Sebagai wakil resmi negaranya, seorang diplomat yang mewakili dan memeragakan

keresmian negaranya di hadapan sesame utusan diplomatic di negara akreditasi. Diplomat mewakili negaranya dalam upacara-upacara kenegaraan serta pertemuan-pertemuan resmi; penganugerahan bintang-bintang jasa/kehormatan, dan acara-acara resmi kenegaraan lainnya, berpenampilan dengan pakaian-pakaian resmi serta peduli terhadap tata krama serta tata cara diplomatic.

c. Negotiation

Fungsi perundingan. Diplomat berperan sebagai pembawa pesan (messenger), senantiasa bertindak instruksi yang diberikan negaranya. Kendati demikian, ia juga harus mengerahkan kemampuannya, mempergunakan wewenang dan tanggung jawabnya untuk memenangkan negosiasi.

Sir Ernest Satow sejak tahun 1922 telah mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelejen dan taktik untuk menjalin hubungan resmi antar pemerintahan yang berdaulat dan kadangkala diperluas dengan hubungan dengan negara-negara jajahannya.

Sejalan dengan definisi Satow, Barston mendefinisikan:

“Diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Di mana negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lainnya berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan, dan mengamankan kepentingan khusus atau yang lebih luas,

yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobi (lobby), kunjungan, dan aktivitas-aktivitas lain yang terkait". (Djelantik, 2008: 3-4).

Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang damai, diplomasi juga dapat terjadi di dalam kondisi konflik bersenjata atau perang. Hal ini dikarenakan tugas utama dari diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharannya dengan melakukan persuasi terus menerus. (Djelantik, 2008: 4).

Definisi paling dekat adalah diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi. Dan militer kepada negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsensi antara para pelaku negosiasi. (Djelantik, 2008: 4).

Diplomasi dapat diselenggarakan dalam pertemuan khusus atau konferensi umum.

Diplomasi berupaya untuk mengubah kebijakan, tindakan, tujuan, dan sikap pemerintahan negara lain dan diplomat-diplomat melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling mempertukarkan konsensi, atau mengirimkan ancaman.

2.1.4 Keamanan

Keamanan didefinisikan sebagai kemampuan bertahan diri dari ancaman yang nyata.

Isu keamanan internasional senantiasa meramaikan Kajian Hubungan Internasional.

Sebagai salah satu bidang kajian utama, konsep keamanan dalam Kajian Keamanan Internasional mengalami perkembangan melalui perdebatan-perdebatan, dari keamanan yang bersifat tradisional (politik-militeristik) sampai non-tradisional (manusiawi dan alternatif).

Teks-teks keamanan tradisional yang berlaku pada masa Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin dengan batasan keamanan yang memfokuskan pada negara sebagai aktor kunci keamanan (*pivotal player*), sumber ancaman sekaligus pencipta stabilitas keamanan, mengalami anomali (*changes and challenges*).

Barry Buzan dalam bukunya yang berjudul *People, States and Fear* mengatakan bahwa “security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked” (Buzan, 2008:36).

Menurut Barry Buzan, makna konsep keamanan tidak hanya meliputi aspek militer dan aktor negara saja melainkan meliputi aspek-aspek non-militer dan non-aktor.

Dalam bukunya yang berjudul “*People, States and Fear*”, Buzan membagi keamanan kedalam 5 (lima) bidang yaitu militer, lingkungan, politik ekonomi, dan societal.

Aspek militer hanya salah satu aspek penting dalam dimensi keamanan, akan tetapi juga lebih kepada *peace and security*. Dimensi keamanan ada perubahan yang dipahami sifatnya secara multidimensional dan bagaimana menjaga suatu negara

dan individu yang ada didalamnya. Menurut John H. Herz dalam bukunya yang berjudul *Political Realism and Political Idealism* menyatakan bahwa dalam konsep keamanan terdapat kondisi suatu negara yang meningkatkan pertahanan dan keamanan guna untuk menghindari ancaman dari luar yang menyebabkan negara – negara sekitarnya merasa terancam dan melakukan tindakan yang serupa, sehingga kondisi tersebut dapat menyebabkan ketegangan bahkan memicu konflik yang disebut dengan dilema keamanan.

Suatu negara menganggap bahwa upaya yang dilakukannya yaitu bersifat defense yaitu usaha untuk mengurangi kemampuan lawan untuk menguasai sesuatu dari pihak negara tersebut dengan tujuan untuk melawan pihak yang menyerang guna meminimalisir kerugian apabila upaya deterrence gagal. Deterrence merupakan tindakan ancaman militer terhadap pihak lain dengan maksud untuk mencegah agar pihak lain tidak melakukan tindakan agresif atau melakukan serangan militer. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi.

Kondisi tersebut dapat terjadi karena sulitnya membangun kepercayaan antar negara, kegagalan dalam membangun komunikasi, faktor sejarah. Pada akhirnya akan berdampak dengan adanya persaingan antar- negara untuk meningkatkan keamanan masing – masing, membentuk aliansi, memicu ketegangan dalam situasi internasional, perlombaan senjata, berpotensi terhadap timbulnya perang. Setelah

berakhirnya Perang Dunia II tatanan global mengalami perubahan. Sehingga konsep keamanan semakin berkembang dengan munculnya isu – isu non-tradisional seperti terorisme, cyber, kemanusiaan, lingkungan hidup yang dimana membawa dampak negatif terhadap tatanan dunia secara global.

Selain itu, aktor yang terlibat tidak hanya negara saja tetapi aktor non-statet seperti organisasi kejahatan transnasional ataupun individu yang melakukan tindak kejahatan dan mengganggu stabilitas suatu negara atau bahkan secara global. Konsep keamanan baru yang diperdebatkan adalah:

1. Keamanan Bersama (Common security). Diperkenalkan oleh komisi Palme (The Palme Commission) pada tahun 1980-1981. Keamanan ini berbicara bahwa mereka percaya hubungan antara aktor yang bermusuhan dapat diubah dengan menciptakan kebijakan keamanan yang saling transparan dan tidak agresif. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan kecurigaan timbal balik tentang niat pihak lain untuk mencegah konflik bersenjata.
2. Keamanan Komprehensif (Comprehensive security). Keamanan ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada semua warga negara atas keamanan ekonomi, sosial, politik dan ekologi di luar keamanan fisik militer. Dari keamanan inilah muncul konsep keamanan manusia (human security).

3. Pengamanan Koperasi (Cooperative Security). Bentuk kerjasama keamanan yang paling fleksibel. Gunakan semua saluran yang terkait dengan semua aspek keamanan. Bentuk kerjasama yang lunak (transparansi, regulasi dan tanpa kekuatan eksekusi).

4. Dengan semakin banyaknya isu – isu yang berkembang dalam Hubungan Internasional, keamanan tidak terfokus kepada kekuatan militer saja tetapi juga dapat berkaitan dengan ekonomi internasional, organisasi internasional, hukum internasional (Burhanuddin, 2017:6). Kemudian, UNDP (United Nations Development Programme) mengidentifikasi 7 (tujuh) kategori-kategori ancaman yang harus dicermati serius, diantaranya:
 1. Keamanan finansial.
 2. Keamanan pangan.
 3. Keamanan kesehatan.
 4. Keamanan lingkungan.
 5. Keamanan pribadi.
 6. Keamanan masyarakat.
 7. Keamanan politik. (United Nations Development Programme, Human Development Report 1994)

Keamanan merupakan hal yang sangat penting dan perlu dipenuhi oleh negara karena

menyangkut kepada rasa aman dari masyarakatnya itu sendiri. Sehingga, suatu negara dapat terbebas dari ancaman baik dari internal negara itu sendiri ataupun eksternal. Dalam penggunaan strategi hybrid warfare yang digunakan oleh Rusia ke Ukraina, telah mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri Ukraina. Dimana politik dalam negeri tidak stabil dan adanya pihak oposisi yang pro-Rusia muncul didalam wilayah Ukraina.

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan Internasional terjadi di antara negara-negara yang terjalin melalui hubungan kerjasama dan ditandai dengan konflik atau persaingan. Kerjasama dilakukan setiap negara untuk mengatasi setiap masalah yang dihadapi oleh negara tersebut baik masalah regional maupun masalah internasional. Salah satu contoh kerjasama adalah kerjasama bilateral yaitu kerjasama antar dua negara atau dua pihak dengan tujuan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Hubungan Indonesia dan Korea Selatan telah terjalin sejak tahun 1968, namun merupakan hubungan konsuler yang hanya berlangsung di tingkat konsulat jenderal. Pada 17 September 1973, hubungan dengan kedutaan (hubungan diplomatik) diperluas.

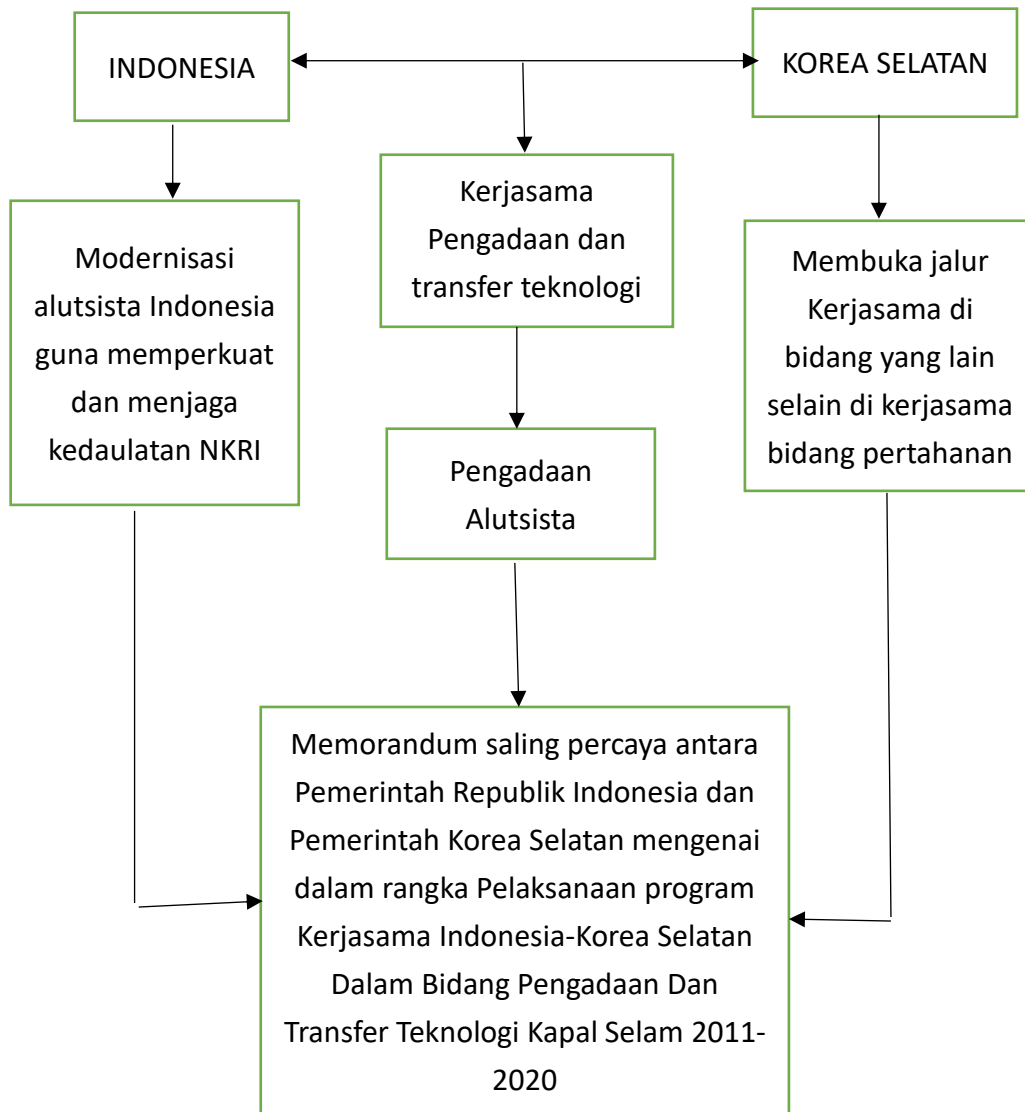
Hubungan Indonesia dan Korea Selatan tidak hanya semakin erat di bidang industri dan teknologi, tetapi juga di bidang kerjasama semakin meluas. Yakni, ekspansi di bidang energi, lingkungan, kelautan dan perikanan, kehutanan, pertanian, imigrasi, ekonomi

politik, hukum, pertahanan dan keamanan, pariwisata, tetapi juga di bidang sosial budaya.

Pada tahun 2017, 129 perjanjian ditandatangani antara Indonesia dan Korea Selatan.

Sementara itu, kerjasama di bidang sosial budaya dan bidang terkait lainnya seperti pariwisata, gizi, pendidikan, olahraga dan perdagangan telah mencakup hampir 20 kesepakatan.

Melalui kerjasama dan perjanjian antara Indonesia dengan Korea Selatan salah satu bentuk diplomasi atau kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Korea Selatan. Kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan mengenai bidang pertahanan sudah banyak, bagi Indonesia Kerjasama ini diharapkan agar Indonesia dapat mendapat pengetahuan dan wawasan lebih dari Kerjasama dan transfer teknologi ini yang diharapkan Indonesia dapat membuat kapal selam secara mandiri dan tidak tergantung dari negara lain.



Gambar 2.1

MODEL KERANGKA PEMIKIRAN